

Nomor Publikasi: 64741413.6474

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

TAHUN 2012



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang
Badan Pusat Statistik Kota Bontang



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG 2012

Nomor Katalog : 1413.6474

Nomor Publikasi : 64745. 1305

Naskah : Seksi Neraca Wilayah dan
Analisis Statistik
Badan Pusat Statistik Kota
Bontang

Diterbitkan Oleh : Kerjasama BAPPEDA Kota
Bontang dengan BPS Kota Bontang

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN WALIKOTA BONTANG

Saya mengucapkan terima kasih dengan telah diterbitkannya buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) Kota Bontang tahun 2012.

Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam membuat kebijakan berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kota Taman yaitu Kota Bontang yang masyarakatnya yang Berbudi Luhur, Maju, Adil dan Sejahtera. Melalui Progran Pendidikan “Tuntas Berkulaitas” untuk menciptakan sumber daya manusia lokal yang cerdas dan berbudi luhur, melalui motivasi beasiswa sampai perguruan tinggi.

Indikator ini dapat disebarluaskan sehingga mampu menjadi pendorong motivasi semua pihak khususnya Dinas/Instansi terkait dalam bekerja lebih prioritas dan lebih keras lagi, supaya mampu mencapai hasil yang memuaskan serta sesuai harapan semua pihak.

Akhirnya saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak, sehingga buku ini dapat diterbitkan, semoga bermanfaat untuk kita semua.

Bontang, Oktober 2013
Walikota Bontang

Ir. H. Adi Darma, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat, anugerah serta Karunia-Nya yang melimpah sehingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bontang Tahun 2012 dapat kembali diterbitkan.

Publikasi IPM Kota Bontang Tahun 2012 ini merupakan publikasi berkelanjutan dari tahun sebelumnya. Penyusunan publikasi ini dimaksudkan sebagai kerangka perencanaan untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan, dengan memanfaatkan paradigma pembangunan manusia sebagai titik strategis dalam pembangunan. Diharapkan publikasi ini dapat berfungsi sebagai input dalam perencanaan, penyusunan kebijakan pemerintah Kota Bontang, dan "Terwujudnya Masyarakat Bontang yang berbudi luhur, maju adil dan sejahtera".

Semoga publikasi ini bermanfaat, terutama untuk keperluan evaluasi dan perencanaan pembangunan di wilayah Kota Bontang. Kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam memberikan data dan pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan publikasi ini, sehingga publikasi ini dapat diterbitkan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Saran dan kritik yang *konstruktif* sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota
Bontang,

Bontang, Oktober 2013
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Bontang,

Jr. Zulkifli, MT
NIP. 19620731 199301 1 001

Drs. H. Basiran Suwandi
NIP. 19601005 198203 1 004

DAFTAR ISI

Sambutan Walikota Bontang.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik.....	vii
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	5
1.3 Fungsi, Lingkup Dan Keterbatasan	7
Bab 2 Formula Dan Metode Perhitungan.....	11
2.1 Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia ...	11
2.2 Komponen Dan Indikator Yang Digunakan	12
2.2.1 Kesehatan	12
2.2.2 Pengetahuan	14
2.2.3 Standar Hidup Layak.....	16
2.3 Rumus Umum Ipm	22
2.4 Reduksi Shortfall (Kecepatan Perubahan Ipm)	30
2.5 Tingkatan Status Pembangunan Manusia	31
Bab 3 Gambaran Umum Kota Bontang.....	33
3.1 Kondisi Umum Wilayah	33
3.2 Kondisi Sosial.....	34
3.2.1 Kependudukan	34
3.2.2 Gambaran Pendidikan.....	38

3.2.3	Gambaran Kesehatan	47
3.2.4	Gambaran Ketenagakerjaan	52
3.2.5	Gambaran Perekonomian	59
Bab 4	Status Pembangunan Manusia.....	67
4.1	Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang .	68
4.1.1	Angka Harapan Hidup	71
4.1.2	Angka Melek Huruf.....	73
4.1.3	Rata-Rata Lama Sekolah	76
4.1.4	Rata-Rata Pengeluaran Riil.....	78
4.2	Perkembangan Ipm 10 Tahun Terakhir.....	82
4.3	Kecepatan Mencapai Angka Ipm Ideal (Reduksi Shortfall)	83
4.4	Keterbandingan Ipm Antar Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Timur	86
Bab 5	Penutup	91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Konversi Lamanya Sekolah dari Jenjang Tertinggi yang Ditamatkan	16
Tabel 2. Daftar Komponen Kualitas Untuk Menghitung Indeks Kualitas Rumah	18
Tabel 3. Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)	20
Tabel 4. Nilai Ekstrim Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yang Digunakan Dalam Penghitungan	28
Tabel 5. Kriteria Tingkatan Status Pembangunan Manusia	31
Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Bontang Tahun 2007-2012.....	35
Tabel 7. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang Tahun 2007 – 2012.....	37
Tabel 8. Jumlah Sekolah di Kota Bontang Tahun 2009 – 2012	41
Tabel 9. Rasio Murid – Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009–2012	42
Tabel 10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2007-2012	45
Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, Tahun 2012	46

Tabel 12. Besarnya Anak Masih Hidup(AMH) dan Anak Lahir Hidup(ALH) Kota Bontang Tahun 2012.....	51
Tabel 13. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, Tahun 2011 – 2012.....	52
Tabel 14. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) Kota Bontang Tahun 2007 – 2012.....	54
Tabel 15. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang Tahun 2009-2012.....	56
Tabel 16. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang Tahun 2007 – 2011	58
Tabel 17. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006–2011	60
Tabel 19. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2009-2012	81
Tabel 20. Perbandingan Reduksi Shortfall IPM Kabupaten/Kota, Tahun 2005 dan 2012	84

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Bontang Tahun 2007-2012.....	35
Grafik 2. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) Kota Bontang Tahun 2007 – 2012	55
Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2007–2012 (persen).....	62
Grafik 4. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2012.....	64
Grafik 5. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2012	64
Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2011-2012 (tahun)	72
Grafik 7. Perbandingan Angka Melek Huruf kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2011 (persen)	75
Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2012 (Tahun)	78
Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2012 (000 Rupiah)	79
Grafik 10. Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2003-2012 (tahun)	82
Grafik 11. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2011-2012	87

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan manusia merupakan paradigma pembangunan yang menempatkan manusia (penduduk) sebagai fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan, yaitu tercapainya penguasaan atas sumber daya (pendapatan untuk mencapai hidup layak), peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat) dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Menurut UNDP (1995), paradigma pembangunan manusia terdiri dari empat komponen utama, yaitu :

1. Produktifitas

Masyarakat harus dapat meningkatkan produktifitas mereka dan berpartisipasi secara penuh dalam proses memperoleh penghasilan dan pekerjaan berupah. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi adalah salah satu bagian dari jenis pembangunan manusia,

2. Ekuitas

Masyarakat harus punya akses untuk memperoleh kesempatan yang adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapus agar masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan memperoleh manfaat dari kesempatan-kesempatan ini,

3. Kestinambungan

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga generasi yang akan datang. Segala bentuk permodalan fisik, manusia, lingkungan hidup, harus dilengkapi,

4. Pemberdayaan

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan bukan hanya untuk mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambil keputusan dan proses-proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut

pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu jender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Dalam *Human Development Report* (HDR) yang dipublikasikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 secara jelas menekankan pesan utama yang dikandung oleh setiap laporan pembangunan manusia baik di tingkat global, tingkat nasional, maupun tingkat daerah, yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Dengan demikian harus ada peningkatan cara pandang yang dulunya pembangunan di Indonesia hanya dilihat dari peningkatan bidang ekonomi semata, juga ke arah pembangunan manusia melalui strategi pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan manusia (*human development*) didefinisikan sebagai perluasan pilihan-pilihan bagi penduduk, yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pembangunan manusia harus dipacu untuk menjadi semacam model pembangunan dimana penduduk merupakan sasaran

utama untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitas hidupnya. Diantaranya berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial lainnya, sehingga dapat diciptakan peluang kerja melalui perluasan dan produktivitas (pertumbuhan) ekonomi dalam negeri sehingga penduduk diberdayakan dalam menentukan harkat martabat manusia pada partisipasi pembangunan. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/ ketrampilan mereka tersebut. Konsep pembangunan diatas jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, dan pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Model pembangunan manusia adalah suatu model pembangunan yang memiliki konsep lebih luas daripada model dengan pendekatan pembangunan SDM, kebutuhan dasar dan kesejahteraan. Konsep pembangunan manusia lebih komprehensif dan bersifat holistic.

Pilihan kebutuhan manusia sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun diantara sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu, pilihan untuk hidup

sehat dan berumur panjang; pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan dan pilihan untuk mempunyai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya.

Agar konsep pembangunan manusia dapat dengan mudah diterjemahkan kedalam pembuat kebijakan, pembangunan manusia harus dapat diukur dan dipantau dengan mudah. Sejak tahun 1990 *United Nations* (PBB) telah memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) sebagai alat untuk mengukur/pengontrol pembangunan manusia melalui suatu model untuk melihat pemberdayaan manusia.

1.2 TUJUAN

Berdasarkan Permendagri No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas), IPM dipakai untuk melihat kondisi dan potensi pembangunan daerah melalui pendekatan pembangunan manusia. IPM

merupakan indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan perbandingan kinerja pembangunan manusia di suatu daerah, khususnya di Kota Bontang tahun 2011.

Penghitungan indeks pembangunan manusia sampai ke tingkat kabupaten/kota adalah sangat penting karena proses desentralisasi (otonomi daerah) yang sedang berjalan di Indonesia saat ini akan memindahkan sebagian besar proses pembangunan ke tangan pemerintah daerah dan masyarakat lokal. Untuk itu tentunya dibutuhkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi setempat (pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan ekonomi) dengan dukungan data-data yang lebih memadai untuk kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penghitungan IPM 2011 merupakan pemutahiran data dari IPM tahun 2010, sehingga akan memberikan gambaran lebih terarah pada keadaan pembangunan manusia terkini kota Bontang. Penghitungan IPM 2011 juga berguna untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia Kota Bontang tahun 2011 dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dan perumusan arah kebijakan oleh pemerintah, sehingga diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih terarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

1.3 FUNGSI, LINGKUP DAN KETERBATASAN

IPM adalah suatu indeks komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah dan juga antar waktu. IPM mencoba menggambarkan suatu pembangunan manusia atau mutu hidup dalam suatu angka indeks. Merupakan suatu kemustahilan jika pembangunan manusia dalam arti luas dapat diukur hanya dengan suatu indeks komposit, tak peduli berapa banyak komponen indikatornya (apabila jika diingat bahwa semakin banyak variabel yang dimasukkan ke dalam indeks komposit, maka semakin besar pula kemungkinan *error* yang ditimbulkan).

IPM juga masih memiliki kelemahan lain yaitu dari segi data dan arti. Dari segi data kelemahannya terletak pada definisi/konsep dan kualitas data yang digunakan antar daerah maupun antar Negara sangat beragam sehingga mengurangi kekuatan IPM sebagai alat banding internasional. IPM juga membutuhkan indikator yang kuantitatif, sehingga untuk beberapa hal IPM mempunyai kelemahan karena tidak mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan output ketiga

komponen di sebuah negara berkembang. Kelemahan lain yang bersifat umum dari suatu indeks komposit adalah tidak memiliki arti tersendiri secara individual.

Akan tetapi di balik kelemahannya, fungsi IPM sebagai sarana untuk menarik perhatian masyarakat terhadap masalah pembangunan manusia telah diakui secara luas. *Statistical Institute for Asia and The Pasific* (SIAP) merekomendasikan negara anggotanya untuk menghitung IPM untuk perbandingan antar wilayah dalam suatu negara, karena pada umumnya definisi/konsep sistem perstatistikan dalam suatu Negara relatif sama sehingga kualitas data yang dihasilkannya pun sama pula.

Setelah diperkenalkannya IPM pada tahun 1990, pada tahun 1995 UNDP memperkenalkan dua jenis indeks pembangunan manusia yang berkaitan dengan jender yaitu (1) *Gender Related Development Index* (GDI) atau indeks pemberdayaan jender (IPJ); dan (2) *Gender Emporment Measure* (GEM) atau indeks pemberdayaan jender (IDJ). IPJ seperti halnya IPM merupakan indeks komposit yang diharapkan dapat merefleksikan capaian upaya keseluruhan pembangunan manusia. Tetapi berbeda dengan IPM, IPJ memperhatikan ketidaksamaan jender. Telah diakui secara luas bahwa suatu faktor krusial bagi keberhasilan upaya pembangunan manusia adalah pemberdayaan

jender. Sebagai upaya agar faktor tersebut dapat dilihat maka UNDP mengembangkan IDJ. Indeks komposit ini menggunakan variabel yang secara eksplisit mengukur pemberdayaan relatif laki-laki dan wanita dalam wilayah aktivitas politik dan ekonomi.

HDI dan ukuran-ukuran lain yang telah dikemukakan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia secara rata-rata, tetapi tidak mengukur kesenjangan manusia (*human deprivations*). Untuk mengisi kesenjangan ini, pada tahun 1997 UNDP memperkenalkan indeks kemiskinan manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* (HPI). Indeks ini mencoba mengungkap deprivasi yang terjadi. Komponen IKM adalah (1) persentase penduduk yang tidak mampu bertahan hidup (meninggal) hingga umur 40 tahun sebagai refleksi dari deprivasi hidup sehat dan panjang umur; (2) persentase penduduk dewasa yang buta huruf sebagai refleksi dari deprivasi di bidang pendidikan, dan (3) akses kepada pembangunan kesehatan, air bersih dan persentase balita yang kurang gizi. Indeks komposit dari ketiganya mewakili deprivasi dari keseluruhan yang terkait dengan ekonomi. Bila IPM mengukur pencapaian rata-rata pada setiap komponennya, maka IKM mengukur magnitude (arah) dan deprivasi (kesenjangan).

Dengan diterbitkannya *Human Development Report* (HDR) – *Human Development Index* (HDI) oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu benar-benar diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Apalagi kalau dana daerah otonom tersebut sangat terbatas sehingga alokasinya perlu disusun seefisien mungkin. Oleh karena itu kehadiran HDR dan HDI menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di kabupaten/kota.

BAB 2

FORMULA DAN METODE PERHITUNGAN

2.1 PENGUKURAN IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan seorang ekonom Pakistan Mahbub ul Haq, serta dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics. Sejak itu indeks ini dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan IPM tahunannya.

Amartya Sen menggambarkan indeks ini sebagai "pengukuran vulgar" oleh karena batasannya. Indeks ini lebih berfokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan

berguna dari pada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan. Indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

IPM mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan dikombinasikan dengan rata-rata lama sekolah (bobot satu per tiga).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

2.2 INDIKATOR YANG DIGUNAKAN

2.2.1 KESEHATAN

Sebenarnya banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur usia hidup tetapi dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara global, maka UNDP memilih indikator Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir, yang biasa dinotasikan e_0 adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh

sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk kelompok umur tersebut bersifat tetap pada masa yang akan datang. Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, dimana semakin tinggi angka kematian bayi maka nilai AHH akan semakin menurun.

Perhitungan e_0 dapat dilakukan dengan bantuan *life table*, namun hal ini belum dapat dilakukan di Indonesia. Sistem registrasi penduduk yang belum dikelola secara baik dan berkesinambungan mengakibatkan data yang dibutuhkan yaitu data kematian menurut kelompok umur tidak tersedia. Oleh karena itu ditempuh alternatif lain yaitu perhitungan secara tidak langsung dengan menggunakan angka proyeksi dari series data e_0 yang dihitung berdasarkan data Sensus Penduduk 1990 dan Sensus Penduduk 2000. Metode ini menggunakan dua variabel yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*life birth*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) untuk setiap wanita berusia 15-49 tahun menurut kelompok umur 5 tahunan. Dengan menggunakan metode ini akan diperoleh tujuh estimasi e_0 untuk rujukan waktu yang berbeda dari setiap sumber data sehingga diperoleh angka estimasi e_0 yang dijadikan dasar penghitungan proyeksi.

Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi

lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain. Oleh karena hal tersebut diatas, maka AHH sudah cukup representatif digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya di bidang kesehatan.

2.2.2 PENGETAHUAN

Untuk mengukur dimensi pendidikan digunakan dua indikator yaitu Angka Melek Huruf (AMH/Lit) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) dengan perbandingan bobot 2 untuk Lit dan 1 untuk MYS. Keabsahan muka (*face validity*) kedua indikator ini jarang dipertanyakan. Yang sering dipertanyakan adalah kepekaan Lit sebagai ukuran dimensi pengetahuan karena angkanya dinilai sudah sangat tinggi di semua wilayah di Indonesia. Walaupun demikian BPS tetap mempertahankan indikator itu karena dua alasan. Pertama, ketika digunakan untuk menghitung IPM pada tingkat Kabupaten/kota indikator ini ternyata masih cukup peka. Kedua, UNDP sampai saat ini masih menggunakan indikator itu sehingga dinilai masih ada baiknya digunakan untuk kepentingan perbandingan internasional. UNDP sebenarnya tidak lagi menggunakan MYS sebagai komponen IPM dan diganti dengan

angka partisipasi sekolah (APS) tetapi alasan yang dikemukakan adalah kesulitan pengumpulan data secara internasional, bukan alasan substansial. Secara substansial MYS yang merupakan indikator dampak diakui lebih unggul dari APS yang merupakan indikator proses sebagai komponen IPM. Karena alasan itu BPS tetap menggunakan MYS sebagai komponen IPM.

Angka Melek Huruf merupakan indikator yang menggambarkan kualitas dasar sumber daya manusia. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya penduduk berumur 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun keatas. Sebagai catatan indikator ini tidak terlalu peka dalam menggambarkan variasi antar provinsi, dampak kelemahan tersebut berkurang dengan memasukkan MYS dalam penghitungan rata-rata indeks pendidikan (IP) yang menurut UNDP dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$IP = 2/3 \text{ Indeks Lit} + 1/3 \text{ Indeks MYS}$$

Rata-rata Lamanya Sekolah (MYS) merupakan ukuran yang lebih nyata dalam mengukur kualitas sumber daya manusia. Indikator ini merupakan kumulatif jumlah tahun yang ditempuh oleh seseorang dalam mengikuti pendidikan formal yang dihitung sampai jenjang

pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau kelas/tingkat tertinggi yang pernah diduduki. Lamanya sekolah dikonversi dari jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Konversi Lamanya Sekolah dari Jenjang Tertinggi yang Ditamatkan

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Lamanya Sekolah (tahun)
(1)	(2)
1. Tidak/belum pernah sekolah	0
2. Sekolah Dasar	6
3. SLTP	9
4. SLTA	12
5. Diploma I/II	13/14
6. Akademi/Diploma III	15
7. Diploma IV/Sarjana	16
8. S2/S3	18/21

2.2.3 STANDAR HIDUP LAYAK

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena

tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara/wilayah/region.

Penghitungan indikator konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dilakukan melalui tahapan pekerjaan sebagai berikut :

- ◆ Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (=A) .
- ◆ Mendeflasikan nilai A dengan IHK ibukota propinsi yang sesuai (=B).
- ◆ Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara.

Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul (Tabel 3).

- ◆ Membagi nilai B dengan PPP/unit (=C).
- ◆ Menyesuaikan nilai C dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai *marginal utility* dari C.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus :

$$\sum E_{(i,j)}$$

$$PPP / \text{unit} = \frac{j}{\sum_j (p_{(g,j)} \cdot q_{(i,j)})}$$

- dimana,
- $E_{(i,j)}$: pengeluaran untuk komoditi j di propinsi ke-i
 - $P_{(g,j)}$: harga komoditi j di DKI Jakarta
 - $q_{(i,j)}$: jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di propinsi ke-i

Unit kuantitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Komponen Kualitas Untuk Menghitung Indeks Kualitas Rumah

Komponen	Kualitas		Skor	
	A	B	A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai	Keramik marmer atau granit	Lainnya	1	0
Luas lantai per kapita	$\geq 10 \text{ m}^2$	Lainnya	1	0

Komponen	Kualitas		Skor	
	A	B	A	B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dinding	Tembok	Lainnya	1	0
Atap	Kayu/sirap, beton	Lainnya	1	0
Fasilitas penerangan	Listrik	Lainnya	1	0
Fasilitas air minum	Leding	Lainnya	1	0
Jamban	Milik sendiri	Lainnya	1	0
Catatan : Skor awal untuk setiap rumah = 1				

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah Indeks Kualitas Rumah dibagi 8. Sebagai contoh, jika suatu rumah tangga menempati suatu rumah tinggal yang mempunyai Indeks Kualitas Rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah $6/8$ atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{Jika } C_{(i)} \leq Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && \text{Jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && \text{Jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && \text{Jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z
 \end{aligned}$$

dimana,

$C_{(i)}$ = Konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z = *Threshold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan secara arbiter sebesar Rp 547.500,- per kapita setahun, atau Rp 1.500,- per kapita per hari.

Tabel 3. Daftar Komoditi Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditas	Satuan	Proporsi Terhadap Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)
1. Beras Lokal	Kg	7,25

Komoditas	Satuan	Proporsi Terhadap Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)
2. Tepung Terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/Cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging Sapi	Kg	0,78
7. Daging Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu Kental Manis	397 gram	0,48
10 Bayam	Kg	0,30
11. Kacang Panjang	Kg	0,32
12. kacang Tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13

Komoditas	Satuan	Proporsi Terhadap Total Konsumsi
(1)	(2)	(3)
21. Mie Instant	80 gram	0,79
22. Rokok Kretek	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air Minum	Kubik	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak Tanah	Liter	1,74
27. Sewa Rumah	Unit	11,56
Total		37,52

*) Berdasarkan data SUSENAS 1996

2.3 RUMUS UMUM IPM

Dalam menghitung IPM terdapat 3 (tiga) macam versi, yaitu IPM I, IPM II, dan IPM III. Perbedaan versi hanyalah berdasarkan sumber pembentuk IPM baik lembaga maupun indikator yang digunakan. Versi IPM I menggunakan model PPT-LIPI dengan mendasarkan pada indikator inti. Versi IPM II menggunakan model PPT-LIPI yang merupakan gabungan antara indikator inti dan indikator sektoral. Versi IPM III menggunakan model UNDP 1990.

1. Versi IPM I

Versi ini menggunakan pendekatan hasil (output), yang meliputi 3 indikator (indikator inti), yaitu angka harapan hidup, pendidikan tamat SD ke atas, dan pendapatan per kapita/pengeluaran per kapita.

Dirumuskan sebagai berikut :

Pembakuan:

$$\text{bak } X_i = \frac{X_i - \text{BB}}{\text{CI}} + \text{Score}$$

dimana:

bak X_i = nilai indikator hasil pembakuan

X_i = indikator yang akan dibakukan

BB = batas bawah daftar konversi

CI = jarak interval

Penghitungan IPM I:

$$\text{IPM I} = \frac{X_h + X_p + X_e}{3}$$

dimana:

X_h = nilai angka harapan hidup setelah dibakukan

X_p = nilai pendidikan tamat SD ke atas setelah dibakukan

X_e = nilai pendapatan / pengeluaran perkapita dibakukan

Hasil perhitungan IPM I berkisar antara 1 sampai 10. IPM paling baik atau tinggi apabila mendekati nilai 10. Sebaliknya IPM paling jelek atau rendah apabila mendekati angka 1.

2. Versi IPM II

Versi ini menggunakan gabungan pendekatan masukan (indikator sektoral) dan pendekatan hasil (indikator inti). Sebelum menghitung IPM II ini masing-masing indikator dibakukan dengan menggunakan formula seperti versi IPM I. Kemudian untuk menghitung indeks, perlu dilakukan pembobotan. Indikator inti dianggap lebih penting daripada indikator sektoral, maka diberi bobot 1,5.

Penghitungan IPM II sebagai berikut:

$$\text{IPM II} = \frac{(\text{NI} \times 1,5) + (\text{NS})}{2,5}$$

dimana:

- NI = nilai rata-rata indikator inti
- 1,5 = angka pembobotan indikator inti
- NS = nilai rata-rata indikator sektoral
- 2,5 = pembagi rata-rata

Hasil perhitungan IPM II juga berkisar antara 1 sampai 10. IPM paling baik atau tinggi apabila mendekati nilai 10 (sempurna). Sebaliknya IPM paling rendah apabila mendekati angka 1.

Versi IPM III

Versi ini menggunakan pendekatan hasil (output) dan formula yang dipakai dalam model UNDP 1990, dengan melalui penghitungan beberapa tahapan.

Tahap pertama menentukan nilai deprivasi dari 3 indikator dasar, yaitu angka harapan hidup, tingkat literasi, dan pendapatan per kapita. Nilai maksimum dan minimum ditentukan untuk setiap indikator. Nilai maksimum menunjukkan tingkat keterbelakangan secara relatif dan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{pj} = \frac{\text{maks } X_j - X_{pj}}{\text{Maks } X_j - \text{min } X_j}$$

Dimana :

I_{pj} = indeks deprivasi

p = Kabupaten/Kota 1,2,...,n

j = indikator 1,2,3

X_{pj} = nilai indikator untuk Kabupaten/Kota

$\text{Maks } X_j$ = nilai maksimum indikator yg dicapai

Min X_j = nilai minimum indikator yang dicapai

Tahap kedua menentukan rata-rata deprivasi dari tiga nilai indikator di atas, dengan rumus yaitu:

$$I_p = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 I_{pj}$$

Tahap ketiga adalah menghitung IPM III dengan cara sebagai berikut:

Penghitungan IPM III:

$$IPM\ III = \frac{X_h + X_p + X_e}{3}$$

Hasil perhitungan IPM III berkisar antara 0 sampai 100. IPM paling baik atau tinggi apabila mendekati angka 100. Sebaliknya IPM paling jelek atau rendah apabila mendekati angka 0.

Indeks yang dihasilkan kemudian dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran teknik penyusunan indeks tersebut pada dasarnya mengikuti rumus sebagai berikut :

$$I_{(i)} = \frac{[X_{(i)} - Min.X_{(i)}]}{[Max.X_{(i)} - Min.X_{(i)}]}$$

$$IPM = \frac{1}{3} \sum_i I_{(i)}$$

dimana :

- $I_{(i)}$ = Indeks komponen IPM ke-i
- $X_{(i)}$ = Nilai komponen IPM ke-i
- Max. $X_{(i)}$ = Nilai komponen IPM ke-i yang tertinggi
- Min. $X_{(i)}$ = Nilai komponen IPM ke-i yang terendah
- i = 1, 2, 3

Dalam studi ini, nilai ekstrim yang digunakan untuk e_0 , Lit dan MYS adalah nilai yang telah ditetapkan UNDP (1990), sehingga nilai indeks untuk masing-masing komponen tersebut dapat dibandingkan secara internasional. Sedangkan nilai ekstrim untuk komponen PPP ditentukan sebagai berikut :

- (1) Nilai minimum adalah nilai PPP provinsi terendah tahun 1999, dan
- (2) Nilai maksimum adalah nilai PPP "target" yang ingin dicapai pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II oleh provinsi yang memiliki nilai PPP tertinggi pada tahun 1993.

Nilai maksimum tersebut ditetapkan 4 (empat) kali nilai PPP provinsi tertinggi tahun 1993, suatu nilai yang setara dengan nilai proyeksi PPP untuk provinsi tersebut pada akhir PJP II dengan asumsi tingkat pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB) 6 sampai 7 persen per tahun.

Jadi masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan rasio selisih antara nilai maksimum dari suatu indikator dengan nilai minimumnya. Standar nilai masing-masing komponen Indeks Pembangunan manusia IPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Nilai Ekstrim Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yang Digunakan Dalam Penghitungan

Komponen IPM	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka harapan hidup (e_0)	25	85	Standar UNDP
Angka melek huruf (Lit)	0	100	Standar UNDP
Rata-rata lama sekolah (MYS)	0	15	UNDP menggunakan combined gross enrolment ratio
Purchasing Power Parity (PPP) yang disesuaikan	300.000*	737.720*	UNDP menggunakan PDB riil

	356.699 [*] ^{**}		perkapita yang telah disesuaikan
--	---------------------------------------	--	----------------------------------

- a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018 (UNDP)
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru tahun 2007

Keterangan :

- *) Proyeksi pengeluaran riil per tahun untuk provinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan rumus Atkinson. Proyeksi ini mengasumsikan kenaikan 6-7 persen per tahun selama 1993-2018.
- ***) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk provinsi yang memiliki angka terendah tahun 1990 digunakan untuk penghitungan IPM tahun 1996
- ***) Nilai minimum Kota Bontang sejak 2007 disesuaikan menjadi Rp. 356.699 dikarenakan dampak krisis ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat secara drastis. Penghitungan ini didasarkan atas garis kemiskinan tahun 2007.

2.4 REDUKSI SHORTFALL (KECEPATAN PERUBAHAN IPM)

Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur dengan rata-rata reduksi shortfall per tahun. Reduksi shortfall adalah peningkatan nilai IPM dalam suatu periode relatif terhadap jarak nilai IPM awal periode ke IPM sasaran (=100). Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum.

Angka shortfall juga merefleksikan prestasi pencapaian dan gambaran yang terbandingkan dari kemajuan pencapaian atau kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah. Nilai reduksi shortfall yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini di dasarkan pada asumsi bahwa laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

Nilai reduksi shortfall juga dapat dihitung untuk masing-masing komponen IPM. Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM (=r) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \left[\frac{(IPM_{t+n} - IPM_t) \times 100}{(IPM_{ref} - IPM_t)} \right]^{\frac{1}{n}}$$

dimana :

IPM_t = IPM pada tahun t

IPM_{t+n} = IPM pada tahun t+n

IPM_{ref} = IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100

2.5 TINGKATAN STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu rendah (kurang dari 50), sedang atau menengah (antara 50-80), dan tinggi (80 ke atas). Sedangkan untuk keperluan perbandingan antar Kabupaten/ kota tingkatan status menengah dipecah lagi menjadi dua, yaitu menengah bawah dan menengah atas. Dengan demikian kriteria tingkatan status pembangunan manusia sebagai berikut :

Tabel 5. Kriteria Tingkatan Status Pembangunan Manusia

Tingkatan Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	$IPM < 50$

Menengah bawah	$50 \leq \text{IPM} < 66$
Menengah atas	$66 \leq \text{IPM} < 80$
Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB 3

GAMBARAN UMUM KOTA BONTANG

3.1 KONDISI UMUM WILAYAH

Secara geografis Kota Bontang terbentang pada 117°22' sampai 117°32' Bujur Timur serta diantara 0°01' sampai 0°112' Lintang Utara. Wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan tanah datar, landai, dan berbukit. Luas Kota Bontang sekitar 497,57 km² yang didominasi oleh lautan 69,9 persen dan sisanya 30,10 persen merupakan wilayah daratan atau seluas 149,8 km².

Dalam menyelenggaraan administrasi pemerintahan, kota ini secara berjenjang terbagi menjadi 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Kecamatan Bontang Selatan memiliki wilayah daratan paling luas (104,40 km²), disusul Kecamatan Bontang Utara (26,20 km²) dan Kecamatan Bontang Barat (19,20 km²).

Secara administrasi, semula Kota Bontang merupakan kota administratif sebagai bagian dari Kabupaten Kutai dan menjadi Daerah Otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47 Tahun 1999

tentang pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Batasan administratif Kota Bontang adalah

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur

3.2 KONDISI SOSIAL

3.2.1 KEPENDUDUKAN

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2012 jumlah penduduk Kota Bontang mengalami pertumbuhan 3.60 persen dari tahun 2011 sehingga menembus angka 154.604 jiwa. Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2012 terdiri atas laki-laki 81.245 jiwa dan perempuan 73.359 jiwa.

Gambaran selama enam tahun terakhir menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun 2012 adalah

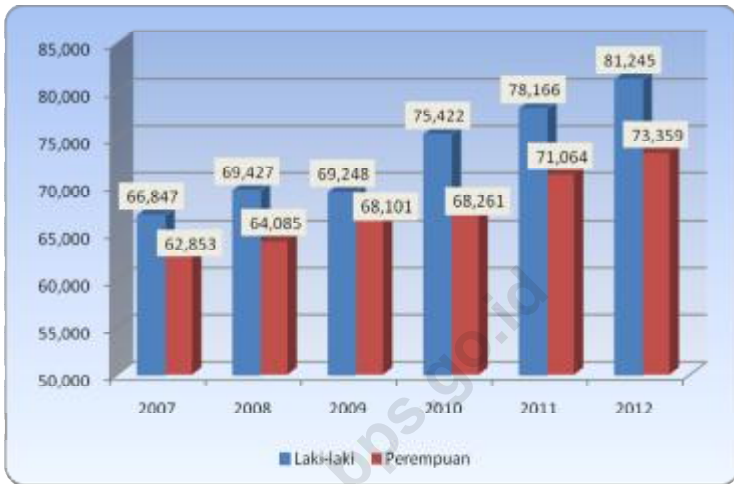
sekitar 111 atau dengan kata lain diantara 100 orang penduduk perempuan terdapat 111 orang penduduk laki-laki di Kota Bontang. Adapun gambaran jumlah penduduk pada tabel dibawah ini

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin Kota Bontang Tahun 2007-2012

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	RJK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	66.847	62.853	129.700	106
2008	69.427	64.085	133.512	108
2009	71.648	65.701	137.349	109
2010	75.422	68.261	143.683	110
2011	78.166	71.064	149.230	110
2012	81.245	73.359	154.604	111

Sumber : BPS Kota Bontang

Grafik 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Bontang Tahun 2007-2012



Keberhasilan pembangunan terhadap kondisi penduduk di suatu daerah salah satunya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk tidak produktif (0-14) tahun dan 65+), atau dengan kata lain angka beban tanggungan menurun.

Dari Tabel 7 di bawah ini terlihat bahwa penduduk usia muda (0–14 Tahun) pada tahun 2012 sebanyak 49.318 jiwa mengalami penurunan dari pada tahun lalu yaitu sebesar (1,76) persen dibanding tahun sebelumnya, dan penduduk dalam kelompok umur produktif (15–64 tahun) berjumlah 103.354 jiwa, atau meningkat 5,99 persen dari tahun 2011. Sedangkan jumlah penduduk umur tua (65 tahun keatas) pada tahun 2012 sebesar 1.932 jiwa, atau bertambah 27,28

persen dari tahun sebelumnya, hal ini dapat diartikan bahwa terjadi migrasi keluar ataupun kematian pada penduduk di usia ini.

Tabel 7. Struktur Umur Penduduk dan Rasio Beban Ketergantungan (RBK) Kota Bontang Tahun 2007 – 2012

Tahun	Umur			RBK
	0 – 14 tahun	15 – 64 tahun	65+ tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	40.420	87.353	1.927	48,48
2008	42.806	89.091	1.615	49,86
2009	45.111	90.888	1.348	51,12
2010	45.942	95.806	1.591	49,61
2011	50.198	97.514	1.518	53,03
2012	49.318	103.354	1.932	49,59

Sumber : BPS Kota Bontang

Dengan melihat komposisi penduduk maka dapat dihitung rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang menyatakan besarnya tanggungan kelompok produktif. Angka ketergantungan sangat penting dalam studi ekonomi, karena angka ketergantungan menunjukkan jumlah penduduk yang secara ekonomi tidak aktif per seratus penduduk yang aktif secara ekonomi. Rasio

ketergantungan pada tahun 2012 adalah sebesar 49,59 yang artinya pada tahun 2012 tanggungan setiap 100 penduduk produktif secara rata-rata sebesar 50 penduduk tidak produktif. Apabila dibandingkan tahun 2011 dengan rasio ketergantungan 53,03, berarti angka rasio ketergantungan tahun 2012 Menurun. Hal ini dimungkinkan oleh penurunan penduduk produktif yang berasal dari migrasi maupun kelahiran.

3.2.2 GAMBARAN PENDIDIKAN

1. Prasarana Pendidikan

Salah satu komponen penting dalam pembangunan manusia adalah pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting yaitu meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup yang berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta memperluas wawasan.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep '*link and match*', yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pemerintah sadar, bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang dengan kemampuan masyarakat. Rendahnya pendapatan keluarga selalu menjadi kendala untuk tidak menyekolahkan anaknya. Realita ini senantiasa ditemui di sekeliling kita. Banyak anak yang mestinya belajar, namun terpaksa bekerja untuk membantu menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini mendorong pemerintah membuat kebijakan wajib belajar

sekolah dasar enam tahun disusul dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun dan bahkan berkomitmen terhadap pendidikan 12 tahun gratis. Program ini telah berjalan efektif di Kota Bontang sejak tahun 2004 hingga saat ini, melalui pembiayaan pada APBD setiap tahun.

Untuk Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah sudah menunjukkan keseriusan dalam mewajibkan pendidikan 12 tahun dengan mengalokasikan dana APBD untuk pendidikan SMU/SMK.

Program atau kebijakan pemerintah dewasa ini dalam bidang pendidikan pada hakekatnya untuk mewujudkan masyarakat Bontang yang berbudi luhur, maju, adil dan sejahtera. Bertujuan untuk menampung jumlah murid sebanyak-banyaknya dan berbagai program pendidikan subsidi secara merata ke seluruh sekolah dengan perhitungan yang sama. Penekanan program adalah pada aspek kuantitas dan kualitas. Hal ini sangat dimaklumi karena pemerintah ingin agar penduduk terbebas dari masalah buta huruf, buta bahasa Indonesia dan buta pendidikan dasar dan menengah.

**Tabel 8. Jumlah Sekolah di Kota Bontang Tahun
2009 – 2012**

Tahun	SD	SLTP	SMU/SMK
(1)	(2)	(3)	(4)
2009	55	34	19
2010	55	34	20
2011	56	34	21
2012	59	34	21

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tahun 2012 di Kota Bontang Angka Melek Huruf (AMH) tercatat 99,22 persen, yang berarti Angka Buta Huruf (ABH) tidak sampai 1 persen, suatu kondisi wilayah yang sangat menggembirakan dicapai oleh kota ini

2. Rasio Murid-Guru

Indikator lain yang cukup berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia adalah rasio murid-guru. Rasio murid-guru menggambarkan ketersediaan guru atau beban kerja seorang guru dalam menangani anak didiknya. Semakin rendah nilai rasio diharapkan semakin banyak perhatian tercurah dari seorang guru

terhadap muridnya. Sehingga diharapkan proses belajar mengajar dapat lebih lancar.

Disamping itu rasio murid-guru dapat digunakan pula untuk melihat tingkat mutu pengajaran di kelas, karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin kurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran semakin rendah. Namun rasio yang terlalu rendah merupakan indikasi bahwa telah terjadi inefisiensi karena kelebihan jumlah guru. Keberhasilan proses pendidikan juga ditentukan oleh peran tenaga pengajar, oleh karena itu beban mengajar seorang guru tidak boleh melebihi batas kemampuan ideal. Rasio murid-guru yang ideal adalah sekitar 20 orang untuk setiap kelas, sehingga proses belajar mengajar bisa berlangsung secara efektif.

Tabel 9. Rasio Murid – Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2009–2012

Jenjang Pendidikan	2009	2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(5)	(5)
SD	18,92	19,51	18,83	21,28
SLTP	11,99	14,71	12,71	14,54
SLTA	11,54	13,25	10,54	12,17

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tahun 2012 rasio murid guru pada tingkat pendidikan SD masih paling besar dan menurun dari pada tahun lalu, yaitu sekitar 21-22 murid ditangani oleh seorang guru. Sedangkan pada tingkat SLTP rasio murid guru sebesar 14,54, dan SLTA mempunyai rasio murid guru paling kecil yaitu 12,17 poin. Rasio murid guru ini telah dapat dipertahankan searah dengan pertambahan jumlah murid yang dapat diimbangi dengan penambahan tenaga pengajar.

Secara umum dapat kita lihat bahwa pada tahun 2012 rasio murid guru di Kota Bontang masih berkisar pada angka dibawah 25, hal ini merupakan salah satu indikasi yang baik bagi pendidikan karena ketersediaan tenaga guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar sudah tercukupi dalam semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Sementara di Indonesia angka rasio murid sekolah dasar dan menengah masih 25 – 30 murid per guru (Dirjen Peningkatan Mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan – Fasli Jalal). Apa yang sudah dicapai oleh Kota Bontang telah jauh lebih maju dan sukses.

3. Tingkat Pendidikan Penduduk

Apabila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, pada tahun 2012 penduduk Kota Bontang yang berumur

10 tahun ke atas yang hanya tamat SD kebawah sebesar 33,57 persen, sedangkan yang mampu menamatkan hingga pendidikan dasar 9 tahun (tamat SLTP) sebesar 19,30 persen. Penduduk yang mampu menamatkan hingga tingkat SLTA sebesar 37,75 persen dan yang mampu menamatkan hingga jenjang Universitas mencapai 9,38 persen. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikannya sampai dengan tingkat SLTP yang berarti pendidikan dasar 9 tahun sudah terpenuhi. Hal ini membuktikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan selain karena desakan atau tuntutan dunia pekerjaan.

Indikator yang dapat dipakai untuk mengukur kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin baik kualitas sumber dayanya. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dapat memberikan gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi yang dapat ditamatkan dan keadaan kualitas manusianya.

Tabel 10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Kota Bontang Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2007-2012

Tahun	SD Kebawah	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat Universitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	42,53	16,85	32,52	8,09
2008	32,80	19,99	38,00	9,22
2009	39,62	18,95	33,24	8,16
2010	31,78	19,89	38,55	9,77
2011	32,95	17,88	38,66	10,51
2012	33,57	19,30	37,75	9,38

Sumber : BPS Kota Bontang

4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah persentase jumlah seluruh siswa pada setiap jenjang pendidikan dibagi jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah seluruh siswa usia tertentu pada setiap jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk usia pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan

Tabel 11. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni SD, SLTP, dan SMU/SMK Kota Bontang, Tahun 2012

Jenjang Pendidikan	APK	APM
(1)	(2)	(2)
SD	102,49	91,74
SLTP	104,53	77,17
SMU/SMK	89,55	70,03
Universitas	8,29	4,92

Secara umum APK di Kota Bontang mempunyai pola yang spesifik untuk setiap jenjang pendidikan dengan korelasi terbalik dimana semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil nilai APK. Selama tahun 2012 APK penduduk pada jenjang SD, SLTP, dan SMU/SMK sudah sangat baik yaitu 102,49 persen, 104,53 persen dan 89,55 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan sudah sangat bagus.

Hal yang sama digambarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP dan SLTA masing-masing 91,74 persen, 77,17 persen dan 70,03 persen.

3.2.3 GAMBARAN KESEHATAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Kesehatan dapat pula dijadikan barometer kesejahteraan seseorang. Karena alasan tersebut kesehatan dijadikan salah satu indikator pembangunan manusia. Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat, terlaksananya pelayanan kesehatan yang bersifat merata, terpadu dan menyeluruh ke semua lapisan masyarakat baik dilihat dari akses untuk memperoleh layanan kesehatan maupun kemampuan ekonomi masyarakat untuk belanja kesehatan. Tujuan akhir dari pembangunan kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum. Mengingat pentingnya faktor kesehatan tersebut, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Upaya tersebut telah membuahkan hasil pada tahun 2013 ini, Kota Bontang dalam lima tahun berturut-turut mempertahankan penghargaan Adipura, kini berhasil mendapatkan

Adipura Kencana Anugerah tertinggi untuk kota terbersih di Indonesia dari Presiden RI. Penghargaan WTN bidang Ketertiban Lalulintas dan Kota Sehat untuk kategori Swasti Saba Wistara Emas dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan terus berupaya mewujudkan melalui pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga berperilaku hidup sehat, pemberian ASKES GAKIN, jaminan kesehatan daerah (jamkesda) gratis kepada penduduk Kota Bontang, Jamkesprov, juga melakukan perbaikan dan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan masyarakat termasuk klinik khusus pegawai pemerintah, klinik dokter keluarga serta RSUD Bontang.

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam di bidang kesehatan selain penghargaan-penghargaan di atas, dapat dilihat melalui beberapa indikator yang dapat mengukur pencapaian pembangunan kesehatan antara lain yaitu usia harapan hidup Kota Bontang mencapai 72,78 tahun 2012 dan angka kematian bayi (*infant mortality rate*), yang relatif rendah 0,27 per 1000 penduduk di tahun yang sama. Disamping itu ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi indikator tersebut antara lain angka kesakitan, lamanya sakit, serta rasio ketersediaannya fasilitas kesehatan.

1. Fasilitas Kesehatan

Prasarana kesehatan yang dimiliki Kota Bontang saat ini meliputi 4 unit Rumah Sakit, 3 unit Puskesmas, 2 unit Puskesmas Pembantu, 3 unit Balai Pengobatan, dan 55 unit praktek Dokter.

2. Angka Kematian Bayi

Derajat kesehatan masyarakat suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator Angka Kematian Bayi (AKB). Indikator ini dapat menunjukkan dimensi sosial dan kesehatan masyarakat dengan bertitik tolak pada pandangan bahwa penduduk yang rentan pada perubahan sosial ekonomi dan kualitas lingkungan adalah mereka yang berumur kurang dari satu tahun. Seperti diketahui bahwa AKB sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi orang tua atau orang yang mengasuh, terutama kesehatan dan gizi perempuan khususnya pada masa kehamilan, melahirkan dan masa menyusui, sehingga semakin baik kondisi sosial ekonomi orang tua maka semakin besar peluang seorang bayi memperoleh kualitas hidup yang lebih baik serta berumur panjang. Besarnya AKB dapat mencerminkan tingkat kepedulian terhadap kesehatan perempuan. Pada dasarnya penghitungan AKB dapat diperoleh

dengan menggunakan Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) melalui program *mortpak*. Definisi Anak lahir hidup (ALH) adalah banyaknya kelahiran hidup dari sekelompok atau beberapa kelompok wanita selama masa reproduksinya sedangkan anak masih hidup (AMH) adalah jumlah anak yang masih hidup yang dimiliki seorang wanita sampai saat wawancara dilakukan.

Perbedaan antara ALH dan AMH merupakan jumlah anak yang meninggal.. Angka ini merupakan bahan perhitungan angka harapan hidup di suatu wilayah.

Apabila dilihat dari tabel dibawah ini dapat dikatakan bahwa persentase total kematian anak pada tahun 2012 adalah sebesar 0,16 persen, sedangkan pada tahun sebelumnya persentase kematian anak sebesar 0,08 persen. Data ini merupakan salah satu indikasi berhasilnya program kesehatan di Kota Bontang pada Tahun 2012.

Tabel 12. Besarnya Anak Masih Hidup(AMH) dan Anak Lahir Hidup(ALH) Kota Bontang Tahun 2012

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)
ALH	2,43	2,42	2,40	2,45	2,60
AMH	2,33	2,17	2,35	2,37	2,44

Sumber : BPS Kota Bontang

3. Angka Kesakitan

Angka kesakitan merupakan salah satu Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam pembangunan kesehatan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang menderita suatu penyakit terhadap seluruh penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Persentase Penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan gangguan kesehatan pada tahun 2012 sebesar 26,98 persen bertambah sebesar 2,76 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Upaya Pemerintah Kota Bontang dalam memberikan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) diharapkan dapat meningkatkan

kualitas sumber daya manusia serta kualitas kehidupan dan usia harapan hidup sehat. Salah satu upaya dari pemerintah Kota Bontang di bidang kesehatan yang terus ditingkatkan adalah dengan mendirikan Klinik Dokter Keluarga di setiap Kelurahan agar masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatannya dengan mudah, tidak terhalang oleh jarak dan waktu.

Tabel 13. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan ada Tidaknya Keluhan Kesehatan, Tahun 2011 – 2012

Ada/tidak keluhan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2011			
1. Ada keluhan	24,54	23,87	24,22
2. Tidak ada	75,46	76,13	75,78
Total	100,00	100,00	100,00
2012			
1. Ada keluhan	25,07	29,09	26,98
2. Tidak ada	74,93	70,91	73,02
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kota Bontang

3.2.4 GAMBARAN KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang

mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi sosial ekonomi. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Angkatan kerja atau lebih dikenal dengan istilah tenaga kerja berdiri dalam dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subjek sekaligus objek dalam pembangunan itu sendiri. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting yang tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, khususnya penduduk yang tergolong usia kerja, sebagian dari mereka diharapkan terlibat di lapangan kerja tertentu atau aktif dalam perekonomian.

Selain menggambarkan daya serap perekonomian terhadap pertumbuhan tenaga kerja, indikator tenaga kerja juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas tenaga kerja menurut sektor dan wilayah.

Tabel 14. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) Kota Bontang Tahun 2007 – 2012

Tahun	Jumlah
(1)	(2)
2007	89.280
2008	90.706
2009	92.238
2010	97.755
2011	100.193
2012	104.286

Sumber : BPS Kota Bontang

Dari tabel 13 dapat dilihat Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas), selama lima tahun terakhir penduduk usia kerja cenderung meningkat. Di tahun 2012 penduduk usia kerja yang berumur 15 tahun keatas mengalami peningkatan sebesar 4,09 persen dari tahun 2011.

Grafik 2. Perkembangan Penduduk Usia Kerja (15 tahun keatas) Kota Bontang Tahun 2007 – 2012



Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dapat diukur dengan banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari kerja). Rasio antara angkatan kerja dan jumlah penduduk usia kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan.

**Tabel 15. Indikator Ketenagakerjaan Kota Bontang
Tahun 2009-2012**

Uraian	2009	2010	2011	2012
(1)	(3)	(4)	(5)	(2)
Angkatan kerja	53 497	55.780	62 257	64728
Bekerja	50 465	51.740	57 755	60 494
Mencari kerja	3 032	4.040	4 502	4 294
TPAK (%)	58,00	57,06	62,87	61,48
TPT (%)	5,67	7,24	7,23	6,54

Sumber : BPS Kota Bontang

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio antara pencari kerja terhadap angkatan kerja, sedangkan kesempatan kerja adalah rasio antara penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja. Kesempatan kerja dapat memberi gambaran besarnya tingkat penyerapan dalam pasar kerja. Pertambahan dan pengurangan penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan dipengaruhi oleh dinamika struktur umur, jenis kelamin dan perbedaan struktur ekonomi dan migrasi. Jika TPT semakin besar maka kesempatan kerja akan

berkurang dan sebaliknya.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bontang tahun 2012 sebesar 61,47 persen, nilai ini mengalami penurunan yang dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 62,87 persen. Hal ini disebabkan karena terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja pada tahun 2012 sebesar 3,97 persen, semula 62.257 jiwa pada tahun 2011 menjadi 64.728 jiwa pada tahun 2012

Sedangkan Tingkat pengangguran terbuka di Kota Bontang pada Tahun 2012 sebesar 6,54 persen yang berarti dari setiap 100 orang penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 6-7 orang yang mencari kerja (pengangguran).

Untuk mengatasi pengangguran beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah sebagai regulator kebijakan yaitu dengan tetap melanjutkan pendidikan gratis karena salah satu sebab pengangguran adalah rendahnya tingkat pendidikan seseorang, selain itu lebih banyak lagi mendirikan tempat-tempat pelatihan keterampilan menjadi salah satu cara mengatasi pengangguran, walaupun tingkat pendidikan rendah apabila keterampilan mumpuni masih dapat bekerja. Selain itu penyediaan kredit yang mudah dan murah dapat merangsang para pelaku usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Tabel 16. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Bontang Tahun 2008 – 2012

Status Pekerjaan	2010	2011	2012
(1)	(4)	(5)	(6)
Berusaha sendiri	22,46	18,42	12,70
Usaha dengan buruh tidak tetap	10,32	9,77	8,34
Usaha dengan buruh tetap	2,12	3,53	5,16
Buruh/Karyawan/Pegawai	60,28	59,94	69,26
Pekerja tidak dibayar	3,74	6,72	3,38
Pekerja Bebas	1,07	1,62	1,15
Total	100	100	100

Sumber: BPS Kota Bontang

Status pekerjaan dikelompokkan menjadi enam kategori yaitu berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tidak tetap dan buruh tetap, buruh/karyawan/pegawai serta pekerja tidak dibayar, dan pekerja bebas seperti terlihat dalam Tabel 16. Kelompok pekerja tidak dibayar atau pekerja keluarga pada umum bekerja pada

sektor informal dengan ciri-ciri jumlah jam kerja dan produktifitasnya yang rendah. Sementara itu pekerja dengan status buruh dikelompokkan sebagai pekerja sektor formal.

Seperti tahun-tahun sebelumnya dan seperti halnya dengan daerah-daerah lain pada tahun 2012 penduduk 15 tahun keatas yang bekerja sebagai buruh /karyawan /pegawai di Kota Bontang ini sangat mendominasi yaitu 69,26 persen. Mereka umumnya bekerja di sektor industri pengolahan, pertambangan dan jasa. Terbanyak kedua adalah penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga yaitu 14,73 persen yang meningkat cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 8,01 persen. Sementara itu penduduk yang bekerja dengan berusaha sendiri menurun persentasenya dari 18,42 persen di tahun 2011 menjadi 12,77 persen di tahun 2012.

3.2.5 GAMBARAN PEREKONOMIAN

1. PDRB Kota Bontang

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi besaran nilai PDRB suatu daerah, sangat tergantung kemampuan faktor produksi dan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dapat dilihat dengan jelas dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu dengan PDRB migas dan PDRB tanpa migas.

Pada Tahun 2011 perkembangan ekonomi Kota Bontang mencapai 61,93 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 16,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ekonomi tanpa unsur migas Kota Bontang mencapai 9,54 triliun rupiah atau naik sebesar 15,55 persen dalam tahun terakhir. Perkembangan perekonomian Kota Bontang (tanpa migas) dipandang sangat relevan diprediksi untuk tahun mendatang akan semakin membaik.

Tabel 17. Perkembangan dan Laju Pertumbuhan PDRB Migas dan Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2006–2011

Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Harga Konstan (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2007	53.842.570	5.350.881	-4,26	4,81
2008	74.716.372	6.436.824	0,84	10,36
2009	52.664.325	7.137.928	-3,03	2,61

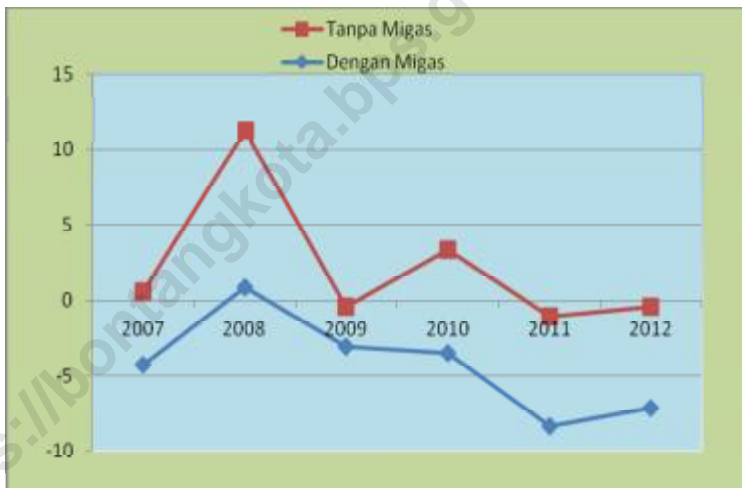
Tahun	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan Harga Konstan (%)	
	Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	53.366.144	8.259.068	-3,44	6,76
2011 ⁾	62.052.362	9.542.630	-8,36	7,29
2012 ⁾	68.508.564	10.986.758	-7,14	6,71

Sumber: BPS Kota Bontang

Angka 68,51 triliun rupiah merupakan nilai PDRB dengan migas atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 ini, nilai ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 62,05 triliun rupiah. Namun demikian pada tahun 2012 ini perekonomian Kota Bontang secara riil tetap mengalami pertumbuhan negatif atau turun sebesar 7,14 persen atas dasar harga konstan tahun 2000. Hal ini disebabkan karena salah satu sub sektor ekonomi yang mendukung perekonomian Kota Bontang dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan pelambatan, yakni jumlah produksi gas alam cair yang terus menurun. Sektor industri terutama industri gas alam cair (LNG) merupakan pendukung utama perekonomian dalam lima tahun terakhir didominasi sumbangannya rata-rata

pertahun mencapai 86,18 persen dari total PDRB Kota Bontang. Sehingga kontribusi besar dari sub sektor tersebut membawa implikasi besar terhadap pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya.

Grafik 3. Laju Pertumbuhan PDRB Dengan Migas dan Tanpa Migas Tahun 2007–2012 (persen)

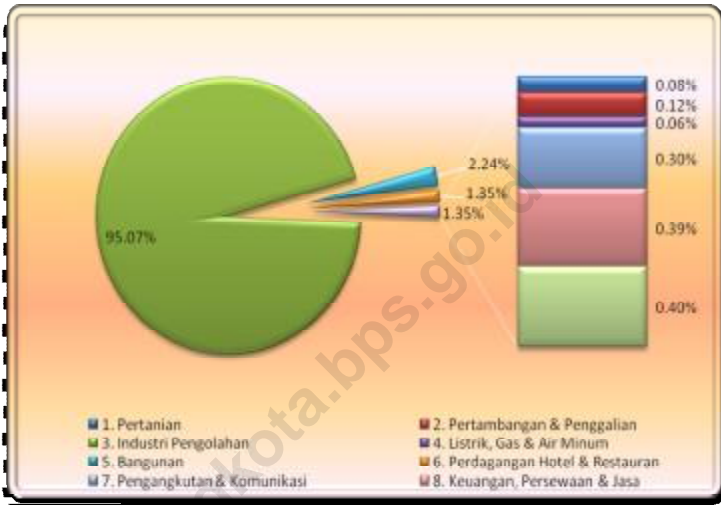


Apabila komponen penghitungan migas dikeluarkan dari perhitungan PDRB, maka diperoleh PDRB Tanpa Migas Kota Bontang tahun 2012 sebesar 10,99 triliun rupiah atau secara riil mengalami kenaikan sebesar 13,82 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 7,29 triliun rupiah.

Jika kita lihat Struktur ekonomi Kota Bontang selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir masih didominasi oleh sektor industri pengolahan, khususnya sub sektor industri migas. Pada tahun 2012 sub sektor industri gas alam cair memberikan sumbangan sebesar 86,18 persen terhadap total PDRB, sedangkan sisanya 13,82 persen merupakan sumbangan dari sektor dan sub sektor lain dari pembentuk total PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas. Hal ini menandakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh PT.Badak LNG sebagai pengolah gas alam cair memegang peranan besar dan menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Kota Bontang.

Sektor industri pengolahan sebagai pembentuk dari total PDRB dengan migas, memberikan kontribusi sebesar 94,08 persen dari total PDRB tahun 2012. Adapun kontribusi masing-masing sektor dapat dilihat pada grafik dibawah berikut ini.

Grafik 4. Struktur Perekonomian Kota Bontang Dengan Migas Tahun 2012



Grafik 5. Distribusi Persentase PDRB Tanpa Migas Kota Bontang Tahun 2012



PDRB per kapita diperoleh dari Nilai PDRB yang dikeluarkan faktor penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun. Sedang pendapatan per kapita diperoleh dari Nilai PDRB yang dikeluarkan faktor penyusutan serta pajak tak langsung neto dari PDRB kemudian dibagi dengan jumlah penduduk pada kondisi pertengahan tahun.

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bontang berfluktuasi dari tahun ke tahun (baik dengan migas maupun tanpa migas), karena di pengaruhi oleh produksi pada sub sektor industri migas kenaikan harga migas terhadap nilai tukar mata uang Dollar Amerika dipasaran internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa sub sektor industri gas alam cair sangat berpengaruh terhadap pembentukan PDRB Kota Bontang.

PDRB perkapita dengan migas Kota Bontang pernah tercatat 383,43 juta rupiah dan 369,12 juta rupiah masing-masing pada tahun 2009 dan 2010 lalu. Pada tahun 2012 terdapat peningkatan yang cukup significant menjadi 414,94 juta rupiah untuk PDRB perkapita dan pendapatan perkapita sebesar 443,67 juta rupiah.

Sedangkan PDRB perkapita dan pendapatan per kapita tanpa migas, mengalami perkembangan lebih stabil selama sepuluh tahun terakhir kearah yang positif.

PDRB per kapita tanpa migas pada tahun 2012 sebesar 71,15 juta rupiah, meningkat 11,25 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan pendapatan per kapita nya mencapai 62,21 juta rupiah yang meningkat lebih dari 11,79 persen dari tahun sebelumnya.

<https://bontangkota.bps.go.id>

BAB 4

STATUS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia merupakan unsur utama dari seluruh kepentingan pembangunan yang menempatkan posisinya pada dua peran yaitu sebagai subyek dan sekaligus juga sebagai obyek pembangunan. Oleh karenanya tuntutan kearah terciptanya manusia yang berkualitas hanya melalui pendidikan sebagai modal pembangunan semakin besar.

Dengan dimasukkannya konsep pembangunan manusia ke dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan absolut dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk mencapai tujuan utama, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan

kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

4.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA BONTANG

Dari hasil penghitungan indeks pembangunan manusia Kota Bontang tahun 2012, maka dapat diketahui secara umum terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam keberhasilan pembangunan manusianya. Hal ini terjadi karena berbagai faktor, dan faktor yang dominan selama ini adalah dengan diterapkannya otonomi daerah, dimana daerah diberi kewenangan yang luas dalam membangun daerahnya. sehingga tiap daerah dapat menentukan prioritas mana yang harus dibangun terlebih dahulu.

Kota Bontang sebagai kota pemekaran yang juga menerapkan sistem prioritas tersebut. Dari sekian

kegiatan pembangunan di Kota Bontang masih menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur dalam peranannya terhadap pembangunan manusia adalah secara tidak langsung sebagai pemacu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu contoh pembangunan infrastruktur yang paling terlihat jelas adalah terbangunnya sarana jalan yang membuka akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas, terutama fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dengan terbukanya akses ini pemerintah mengharapkan masyarakat dapat secara aktif menggunakannya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jika diukur dengan menggunakan jarak yang ditempuh menuju nilai ideal, maka reduksi shortfall selama kurun waktu 2011-2012 menunjukkan angka 1,49 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa angka IPM Kota Bontang mengalami kemajuan yang cukup tinggi, segala upaya pemerintah dalam membangun kualitas manusia penduduk Kota Bontang sudah menunjukkan suatu keberhasilan. Sedangkan untuk peringkat antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Bontang masih bertahan pada peringkat ke-3, dimana posisi pertama dan kedua masih diduduki

oleh Kota yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

Berdasarkan kajian analisis IPM Kota Bontang, jika dilihat dari komponen-komponennya maka yang menguatkan nilai indeks IPM Kota Bontang terletak pada komponen Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Rata-rata Lama Sekolah. Ketiga indikator ini pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang significant dengan indeks masing-masing AHH sebesar 72,78, AMH 99,22 dan rata-rata lama sekolah 10,40, yang keseluruhannya tertinggi di Kalimantan Timur dan jauh di atas Kota Balikpapan, Samarinda dan Tarakan. Namun Kota Bontang sangat tertinggal di daya Beli masyarakat yang umumnya masyarakat pinggiran (pantai) kurang variasi konsumsi sesuai rekomendasi UNDP terhadap 27 komoditi yang disesuaikan sampai dengan tahun 2018. Ke depan langkah intervensi pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat sebagai berikut :

1. Mendekatkan pemukiman pada akses pasar (komoditi) berada di sekitarnya / mudah dijangkau.
2. Memberikan tambahan keterampilan pemenuhan variasi asupan keluarga.
3. Peningkatan pendapatan / kesejahteraan masyarakat supaya kemampuan daya belinya meningkat.

4.1.1 ANGKA HARAPAN HIDUP

Indikator ini menunjukkan kondisi dan sistem pelayanan kesehatan masyarakat, karena mampu mempresentasikan output dari upaya pelayanan kesehatan secara komprehensif. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa jika seseorang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki derajat kesehatan yang semakin baik maka yang bersangkutan akan berpeluang memiliki usia lebih panjang atau mempunyai angka harapan hidup yang tinggi.

Besarnya nilai AHH berkaitan erat dengan angka kematian bayi, dimana semakin tinggi kematian bayi nilai AHH akan menurun. Faktor yang mempengaruhi perubahan AHH dapat ditinjau dari berbagai hal seperti kondisi lingkungan dan status sosial ekonomi penduduk, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, status gizi dan lain-lain.

Grafik 6. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2011-2012 (tahun)



Dari grafik di atas, angka harapan hidup penduduk Kota Bontang dengan besaran 72,78 tahun telah menempatkan Bontang pada posisi ke 3 tertinggi setelah Pasir dan Bulungan dengan besaran masing-masing 73,79 tahun, 73,32 tahun. Angka harapan hidup Kota Bontang tahun 2012 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 0,18 poin dari tahun 2011. Sedangkan Angka angka harapan hidup penduduk provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2012 sebesar 71,58 tahun.

Pembangunan yang dilakukan Kota Bontang dalam mewujudkan Bontang Sehat dengan memberikan fasilitas pengobatan gratis kepada penduduk Kota Bontang ikut mendongkrak kenaikan komponen angka harapan hidup.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kualitas hidup penduduk Kota Bontang relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Upaya penurunan mortalitas perlu dilakukan demikian pula usaha pengendalian fertilitas, karena keberhasilan mengurangi laju pertumbuhan penduduk pada dasarnya akan mempercepat terjadinya peningkatan kualitas hidup. Dengan demikian penanganan masalah demografi sepatutnya ditempatkan sebagai isu sentral dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi, baik untuk kesehatan, pendidikan, perumahan maupun perluasan kesempatan kerja. Hal ini diupayakan karena sebagai dasar untuk memperkuat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

4.1.2 ANGKA MELEK HURUF

Proses pendidikan akan melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan sebagai bekal untuk berperan dan berinteraksi dalam

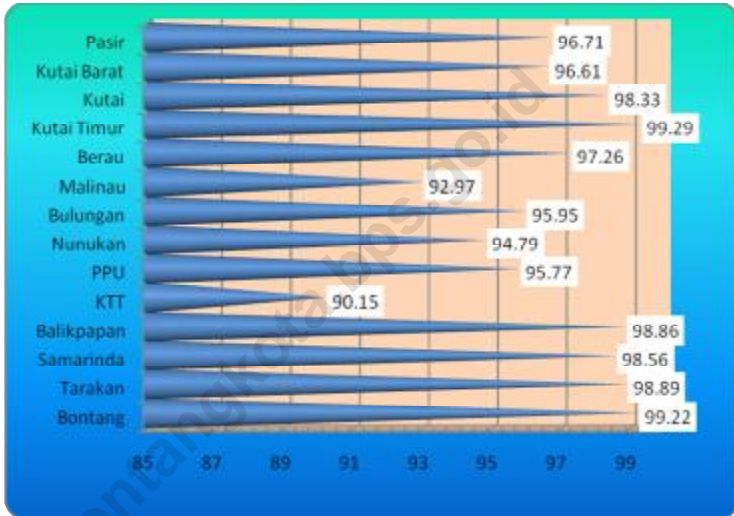
masyarakat. Kemampuan dasar yang diperoleh dalam proses belajar adalah kemampuan baca tulis.

Kemampuan ini penting bagi seseorang sebagai sarana untuk dapat mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peluang orang tersebut untuk mendapatkan/menciptakan pekerjaan dengan hasil yang lebih baik demi menunjang kesejahteraan bersama.

Indikator ini dapat diukur dengan angka melek huruf, yang merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya terhadap seluruh penduduk yang berusia 15 tahun keatas.

Pada tahun 2012 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bontang sebesar 99,22 yang artinya sebanyak 99,22 persen penduduk Kota Bontang yang berusia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya. Hanya 0,79 persen saja dari penduduk Kota Bontang yang tidak bisa membaca dan menulis, membaik jika dibandingkan tahun 2011, diperkirakan mereka adalah penduduk yang berusia lanjut sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk belajar baca-tulis. Untuk tahun ini AMH kota Bontang menduduki peringkat kedua setelah Kutai Timur yang memiliki AMH sebesar 99,29 persen sedangkan Kota Bontang sebesar 99,22 persen.

Grafik 7. Perbandingan Angka Melek Huruf kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2011 (persen)



Meskipun angka melek huruf penduduk Kota Bontang telah mencapai angka ideal yaitu diatas 90 persen, namun belum berarti tugas pemerintah telah usai, akan tetapi tantangan baru untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi telah menunggu. Dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan telah dicanangkan program Wajib Belajar (Wajar) pendidikan dasar 12 tahun sejak tahun 2004. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah

serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan di Kota Bontang.

Di tingkat regional khususnya di Kota Bontang selain dengan memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, untuk menambah tingkat kesejahteraan dan peningkatan mutu pendidikan, pemerintah kota juga memberikan honor tambahan bagi tenaga pendidik dan administrasi untuk semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta termasuk Taman Kanak-kanak. Selain memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah juga serius dalam menangani pendidikan yaitu dengan dibebaskannya SPP dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas. Dan juga adanya pemberian beberapa beasiswa pendidikan, baik dari pemerintah kota maupun dari organisasi non pemerintah seperti PT.Badak LNG dan PT. Pupuk Kaltim kepada pegawai pemerintah daerah dan masyarakat Bontang sehingga memberikan dampak yang luas bagi percepatan peningkatan sumber daya manusia.

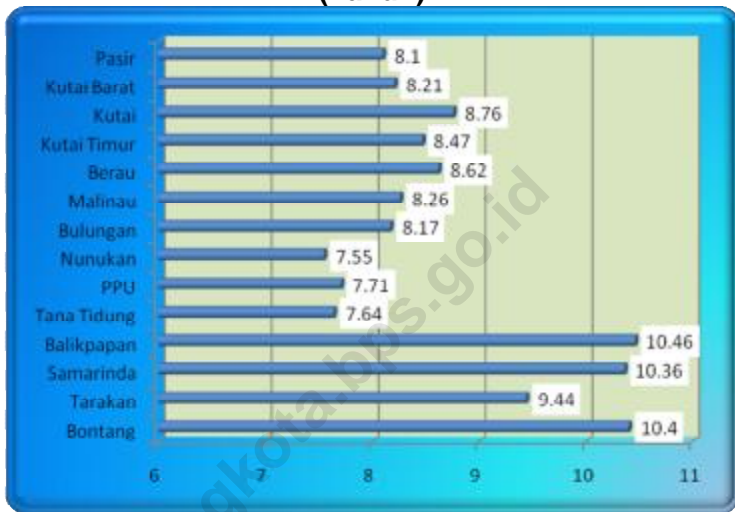
4.1.3 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Disamping kemampuan dasar baca tulis, diperlukan suatu indikator yang dapat mewakili tingkat ketrampilan bagi mereka yang telah memperoleh pendidikan. Semakin lama mereka mengenyam bangku

sekolah diharapkan memiliki ketrampilan yang lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan hal itu adalah rata-rata lama sekolah. Ukuran ini memberikan sejauhmana tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk.

Pada tahun 2012 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai angka 10,40 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kota Bontang bersekolah hingga kelas sepuluh atau kelas dua Sekolah lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata mengenyam pendidikan hingga jenjang SLTA selama 1 tahun lebih 4,80 bulan atau 0,24 bulan lebih lama daripada tahun lalu. Peningkatan rata-rata lama sekolah Kota Bontang dari tahun lalu telah menggeser Kota Balikpapan dari posisi jawara di Kalimantan Timur, Sehingga urutannya menjadi Kota Bontang di peringkat pertama, disusul Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, prestasi yang sungguh membanggakan bagi Kota Bontang..

Grafik 8. Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2012 (Tahun)



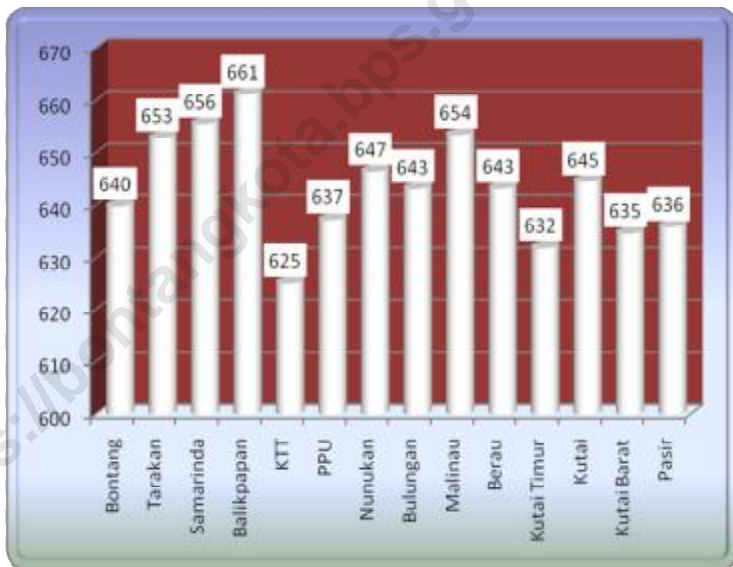
Tidak dapat dipungkiri angka rata-rata lama sekolah ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun, karena semakin sadarnya penduduk akan pentingnya pendidikan dan juga peranan aktif dari pemerintah untuk semakin membuka akses penduduk terhadap sarana dan fasilitas pendidikan.

4.1.4 RATA-RATA PENGELUARAN RIIL

Indikator ini merupakan indikator dengan perkembangan paling cepat dari indikator pembangunan manusia lainnya. Hal ini terlihat dari peningkatan pengeluaran riil per Kapita penduduk Kota Bontang,

dimana pada tahun 2011 sebesar 636.970 rupiah dan meningkat di tahun 2012 sebesar 639.880 rupiah bertambah sebesar 2.910 rupiah perkapita atau sekitar 0,46 persen.

Grafik 9. Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Riil Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2012 (000 Rupiah)



Peningkatan pengeluaran tersebut dipengaruhi banyak hal, terutama adanya kondisi perekonomian secara global, seperti peningkatan harga bahan kebutuhan pokok baik bahan makanan maupun non bahan makanan, inflasi, dan lain-lain. Tetapi peningkatan pengeluaran juga bisa disebabkan karena

peningkatan pendapatan penduduk, sehingga mereka tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi sudah mulai memikirkan kebutuhan sekunder dan tersier.

Pendekatan melalui pengeluaran yang merefleksikan pendapatan penduduk merupakan ukuran kemampuan penduduk untuk melakukan pemenuhan kebutuhan hidup secara wajar dan layak. Keterkaitan masalah pendapatan tentunya ada hubungannya dengan variabel yang mempengaruhi pertumbuhan kemampuan daya beli masyarakat, variabel sub komponen pendapatan tersebut adalah:

- a. Produktivitas : PDRB per kapita.
- b. Pendidikan, meliputi persentase penduduk tamat SLTA atau lebih tinggi.
- c. Lapangan pekerjaan, meliputi persentase angkatan kerja di sektor sekunder.
- d. Status pekerjaan.

Variabel di atas sangat dominan sekali dalam mempengaruhi pendapatan yang akan memberikan konsekuensi pengaruhnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu perhatian terhadap variabel-variabel di atas termasuk sub variabel yang eksis dalam mempengaruhi kemampuan daya beli masyarakat, sebaiknya mendapatkan perhatian yang khusus. Hal ini dikarenakan komponen pendapatan

merupakan komponen yang sangat rawan dalam melahirkan ketimpangan distribusi pendapatan, kecemburuan sosial serta masalah pengangguran dan kemiskinan.

Daya beli ini ditekankan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga sesuai paket komoditi yang disesuaikan dengan kebutuhan di DKI Jakarta (lihat tabel 3).

Tabel 19. Indikator Pembangunan Manusia Kota Bontang, Tahun 2009-2012

Indikator	2009	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Angka harapan hidup (tahun)	72,26	72,42	72,60	72,78
2. Angka melek huruf (%)	99,08	99,20	99,21	99,22
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,01	10,04	10,38	10,40
4. Pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan (rupiah)	630.410	633.430	636.970	639.880
IPM	76,52	76,88	77,52	77,85

Peringkat Provinsi	3	3	3	3
Nasional	35	-	-	-
Reduksi Shortfall	1,84	1,55	2,77	1,49

Sumber : BPS Kota Bontang

4.2 PERKEMBANGAN IPM 10 TAHUN TERAKHIR

Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang selama sepuluh tahun terakhir mengalami trend yang positif, nilainya selalu naik tiap tahunnya. Tercatat di tahun pertama Kota Bontang terbentuk yaitu tahun 2003 angka IPM menyentuh angka 74,51 tahun, kemudian naik menjadi 74,69 tahun di tahun 2004, dan untuk selanjutnya tahun 2012 angka IPM Kota Bontang terus menerus mengalami kenaikan sehingga tembus di angka 77,85. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan manusia di Kota Bontang berhasil.

Grafik 10. Perkembangan IPM Kota Bontang, Tahun 2003-2012 (tahun)



4.3 KECEPATAN MENCAPAI ANGKA IPM IDEAL (REDUKSI SHORTFALL)

Upaya percepatan Angka ideal IPM suatu wilayah yang disebut Reduksi Shortfall dari masing-masing kabupaten/ kota di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 20. Perbandingan Reduksi Shortfall IPM
Kabupaten/Kota, Tahun 2012**

Kabupaten/Kota	IPM		Reduksi Shortfall
	2011	2012	
(1)	(2)	(3)	(4)
Pasir	75,40	75,85	1,81
Kutai Barat	73,69	74,05	1,39
Kutai Kartanegara	73,51	74,24	2,75
Kutai Timur	72,88	73,75	3,20
Berau	74,63	75,05	1,68
Malinau	73,26	73,63	1,38
Bulungan	75,54	76,03	1,99
Nunukan	74,38	74,84	1,82
Penajam PU	74,03	74,35	1,26
Tana Tidung	71,87	72,66	2,78
Balikpapan	78,85	79,38	2,49
Samarinda	77,63	78,26	2,81
Tarakan	77,19	77,76	2,47
Bontang	77,52	77,85	1,49
Kalimantan Timur	76,22	76,71	2,15

Sumber : BPS Kota Bontang

Tingkat kecepatan pencapaian menuju angka ideal IPM (100 persen) Kota Bontang dari tahun 2011 ke tahun 2012 adalah 1,49 persen. Kota Bontang menempati urutan ke empat terbawah, hanya unggul dari Kabupaten Kutai Barat, Malinau dan Penajam Paser Utara.

Melihat kenyataan ini pemerintah Kota Bontang harus segera bertindak untuk mempercepat lambannya peningkatan IPM. Apabila tidak dilakukan bukan tidak mungkin angka IPM Kota Bontang yang sudah berada di posisi ke 3 selama bertahun-tahun akan digeser kabupaten kota lain.

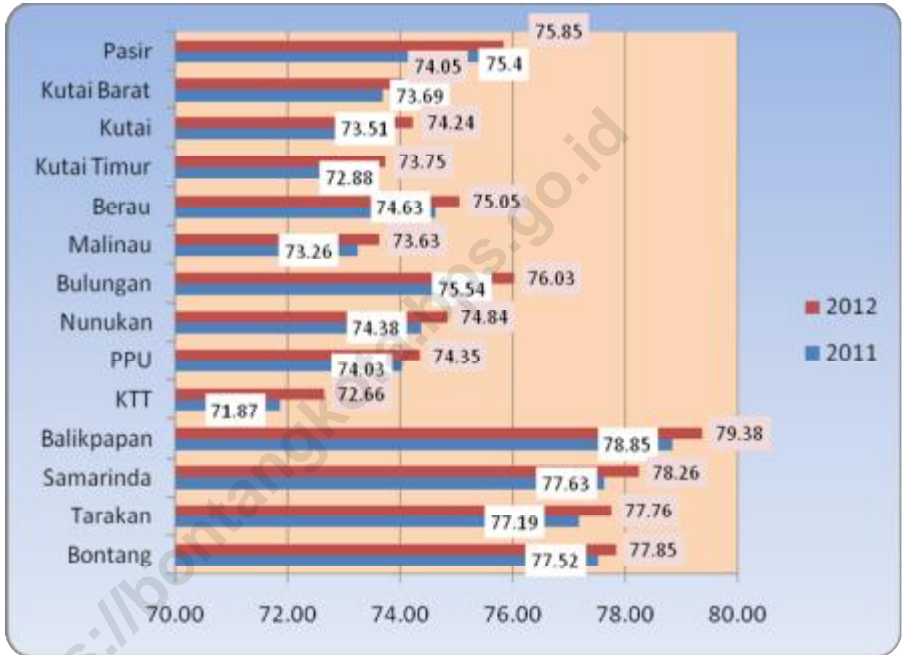
masyarakat daerah pedesaan tidak bisa mengkasas karena harus mengeluarkan biaya transportasi yang besar dan waktu yang cukup lama, sementara tingkat pendapatan yang dimiliki masih sangat rendah.

4.4 KETERBANDINGAN IPM ANTAR KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur yang menduduki lima besar masih diduduki oleh kabupaten/kota yang sama dengan tahun lalu yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, Tarakan dan Kabupaten Bulongan.

Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Timur secara umum dari 14 kabupaten/kota adalah sebesar 71,40 tahun. AHH tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur dicapai oleh Kabupaten Pasir yaitu 73,44 tahun, sedangkan AHH terendah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 68,05 tahun. Seperti tahun sebelumnya Kota Bontang menduduki urutan keempat diantara seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur yaitu sebesar 72,60 tahun, angka ini sudah melebihi 1,2 tahun dari AHH provinsi.

Grafik 11. Keterbandingan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, Tahun 2011-2012



Sedangkan jika kita lihat dari Angka Melek Huruf rata-rata 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 97,21 persen. Untuk Kota Bontang angka Melek Hurufnya menempati urutan Kedua dengan nilai 99,22 persen, urutan Pertama diduduki Kabupaten Kutai Timur, Sedangkan urutan terakhir diduduki oleh Kabupaten termuda di Kalimantan

Timur yaitu Kabupaten Tana Tidung sebesar 90,15 persen.

Rata-rata lama sekolah di provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 9,22 tahun. Untuk posisi empat besar ditempati oleh daerah yang berstatus kota dengan rata-rata penduduknya yang berusia 15 tahun keatas sudah mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 1 SLTA. Kota Bontang menduduki peringkat kedua di Provinsi Kalimantan Timur setelah digeser kedudukannya oleh Kota Balikpapan dari posisi puncak pada tahun lalu dengan rata-rata lama sekolah selama 10,40 tahun. Sedangkan posisi kunci diduduki Nunukan yaitu 7,47 tahun atau rata-rata penduduknya yang berusia 15 tahun keatas bersekolah hingga kelas 1 SMP.

Sedangkan pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan atau Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity = PPP*), memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menaikkan atau menurunkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di DKI Jakarta. Pada tabel 20 terlihat nilai PPP Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 649.850

rupiah. Nilai PPP per kabupaten/kota di Kalimantan Timur tertinggi masih dicapai oleh Kota Balikpapan yaitu sebesar 661.330 rupiah, diikuti oleh Kota Samarinda dengan 655.710 rupiah dan Kabupaten Malinau serta Kota Tarakan masing-masing sebesar 653.630 dan 653.000 rupiah. Sedangkan Kota Bontang menempati urutan ke-9 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, dengan nilai PPP sebesar 639.880 rupiah. Sedangkan nilai PPP terendah diduduki oleh Kabupaten Tana Tidung, yaitu sebesar 625.180 rupiah.

Tabel 21. Indikator Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur Dirinci menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp 000)	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pasir	73,79	96,71	8,10	635,96	75,85	6
Kutai Barat	70,61	96,61	8,21	634,68	74,05	11
Kutai Kartanegara	68,17	98,33	8,76	644,56	74,24	10
Kutai Timur	69,03	99,29	8,47	631,96	73,75	12
Berau	70,43	97,26	8,62	643,26	75,05	7

Kab/Kota	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Rata-rata Lama sekolah (Tahun)	Pengeluaran per kapita riil disesuaikan (Rp 000)	IPM	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Malinau	68,62	92,97	8,26	653,63	73,63	13
Bulungan	73,32	95,95	8,17	643,16	76,03	5
Nunukan	72,01	94,79	7,55	646,55	74,84	8
Penajam PU	71,80	95,77	7,71	637,30	74,35	9
Tana Tidung	72,76	90,15	7,64	625,18	72,66	14
Balikpapan	72,61	98,86	10,46	661,33	79,38	1
Samarinda	71,62	98,56	10,36	655,71	78,26	2
Tarakan	72,19	98,89	9,44	653,00	77,76	4
Bontang	72,78	99,22	10,40	639,88	77,85	3
Kalimantan Timur	71,68	97,55	9,22	649,85	76,71	-

Sumber : BPS Propinsi Kalimantan Timur

BAB 5

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Prinsip pembangunan manusia adalah azas pemerataan yang diimplementasikan dalam berbagai program pembangunan. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan terjadi peningkatan kualitas fisik dan mental penduduk yang dilakukan pemerintah melalui pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan manusia sebagai sub-sistem pembangunan diharapkan dapat menimbulkan keragaman dan diversifikasi dalam kegiatan masyarakat. Semakin beragam kegiatan masyarakat semakin besar kemampuan masyarakat dalam mengembangkan pilihan-pilihannya. Sebaliknya pengembangan sumber daya manusia akan dapat meningkatkan usaha ekonomi masyarakat melalui kemampuan mengelola sumber daya untuk memperoleh hasil yang optimal.

Dalam konteks pembangunan daerah, IPM dijadikan sebagai salah ukuran utama dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah yakni menjadi kunci bagi

terlaksananya perencanaan pembangunan daerah. Pertimbangan lain adalah IPM dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena IPM sangat sensitif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Pendekatan hak dalam pembangunan manusia selaras dengan pengembangan dan prakarsa Strategi Penghapusan Kemiskinan (Bebas Kemiskinan) kalau nasional Program Strategi Penghapusan Kemiskinan Nasional (SPKN) dan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Milenium (MDGs)

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Bontang Tahun 2012 adalah:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit tunggal yang mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia atau status tiga kemampuan dasar penduduk, yakni umur panjang dan sehat yang mengukur peluang hidup, berpengalaman dan berketerampilan, serta akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup layak.
2. Selama periode 2011-2012 secara rata-rata pembangunan manusia di Kota Bontang mengalami peningkatan dengan status pembangunan manusia

yakni pada Tingkat Status Menengah Atas, status yang sama dengan tahun sebelumnya, namun dalam nilai yang lebih tinggi yaitu 77,85.

3. Pada tahun 2012 seluruh komponen IPM mengalami kenaikan, angka harapan hidup meningkat 0,18 poin dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk komponen angka melek huruf mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin. Begitupun dengan rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil perkapita keduanya mengalami peningkatan.
4. Peningkatan angka harapan hidup di Kota Bontang menunjukkan taraf kesehatan penduduk Kota Bontang semakin baik. Peningkatan tidak lepas dari peranan dari Pemerintah yang memberikan kesehatan gratis melalui program jamkesda dan juga kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatannya secara dini.
5. Dalam bidang pendidikan angka melek huruf Kota Bontang sebesar 99,22 persen. Angka ini berarti dari jumlah penduduk Kota Bontang berusia 15 tahun ke atas 99,22 persennya tidak lagi buta huruf. Angka ini memang cukup memuaskan dan telah mencapai angka ideal yaitu di atas 90 persen. Hal tsb juga dapat terwujud berkat kebijakan Pemerintah Kota Bontang yang membebaskan biaya spp dari tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat SLTA.

Sedangkan rata-rata lama sekolah Kota Bontang adalah sebesar 10,40 tahun, jadi mereka rata-rata telah melanjutkan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selama 1 tahun lebih 5 bulan.

6. Dalam bidang ekonomi, juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk yang berdampak pada meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan rata-rata pengeluaran riil perkapita. Pada Tahun 2011 rata-rata pengeluaran riil perkapita sebesar 636.970 rupiah meningkat menjadi 639.880 rupiah di tahun 2012.
7. Secara keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kota Bontang Tahun 2012 adalah sebesar 77,85.

5.2 SARAN

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah, memberikan keleluasaan dan kewenangan yang lebih kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing termasuk di dalamnya adalah keleluasaan dan kewenangan pembelanjaan.

Kesempatan ini diberikan kepada DPRD baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/ kota.

Upaya desentralisasi yang dilakukan belakangan ini telah membangkitkan kekhawatiran bahwa pemerintah daerah akan mengabaikan pembangunan sosial jangka panjang karena mereka cenderung untuk mengarahkan perhatian pada kegiatan ekonomi jangka pendek yang menghasilkan uang. Oleh karenanya, pemanfaatan konsep pembangunan manusia sebagai alat advokasi bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan akan menjadi sangat penting.

Salah satu cara untuk menjamin bahwa desentralisasi akan berjalan untuk kepentingan semua rakyat adalah dengan membuat kesepakatan sosial baru (*new social compact*) : suatu kesepakatan bahwa semua warga negara Indonesia berhak atas suatu standar pembangunan manusia yang menjadi kesepakatan nasional. Mereka berhak untuk bisa membaca dan menulis, misalnya, untuk hidup sehat, untuk bisa mendapat penghasilan yang layak, dan untuk mendapat rumah yang memadai.

Konsep pembangunan manusia mempunyai cakupan yang sangat luas melingkupi hampir seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari kebebasan untuk menyatakan pendapat, untuk mencapai kesetaraan jender, untuk memperoleh pekerjaan, untuk menjaga

gizi anak, untuk bisa membaca dan menulis. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di lain pihak mempunyai cakupan yang lebih sempit. Meskipun IPM mencoba untuk mengukur tingkat pembangunan manusia, indeks ini hanya mampu mengukur sebagian saja. Hal ini disebabkan karena berbagai aspek seperti tingkat partisipasi masyarakat atau kesehatan mental sangat sulit untuk diukur atau dikumpulkan datanya.

Oleh karenanya daerah harus lebih memfokuskan diri pada konsep pembangunan manusia secara luas serta penerapan prinsip-prinsip utamanya, daripada hanya memfokuskan pada indeks semata. Artinya, dalam setiap aspek pekerjaannya, pejabat dan pegawai daerah harus mengutamakan manusianya dengan meletakkan manusia bukan sebagai alat pembangunan tetapi sebagai tujuan utama dari pembangunan. Misalnya, daripada meningkatkan pendidikan dan menjaga kesehatan masyarakat hanya untuk menyediakan tenaga kerja yang lebih baik atau untuk meningkatkan perekonomian, selayaknya pejabat dan pegawai daerah membantu masyarakat di daerahnya untuk menjalankan kehidupan yang lebih berarti dan memuaskan. Oleh karena itu, semua kegiatan mulai dari pembangunan jalan atau pemberian lisensi penambangan, atau pembangunan fasilitas kesehatan baru harus bertujuan untuk memperluas

kesempatan dan pilihan yang dimiliki masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak anti pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Dalam jangka pendek, dengan pengeluaran publik yang teratur, suatu daerah dapat mencapai kemajuan yang signifikan dalam pembangunan manusia, meskipun tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup berarti. Meskipun parameter pembangunan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai arti penting bagi pembangunan manusia, namun dalam jangka panjang tidak akan ada kemajuan yang berkelanjutan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi.

Perhatian pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada laju pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada aspek pendistribusiannya. Jadi bukan hanya masalah berapa besar pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan yang seperti apa. Perhatian harus lebih ditujukan pada struktur dan kualitas dari pertumbuhan untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia baik bagi

generasi sekarang maupun generasi mendatang. Perhatian utama dari kebijakan pembangunan haruslah ditekankan pada bagaimana keterkaitan tersebut dapat diciptakan dan diperkuat.

<https://bontangkota.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Bontang
Jalan Awang Long, Kota Bontang
Telp./Faks 0548.26066, 27706